



PERSYARATAN PEMBANGUNAN

Setop Proyek Hotel Tak Berizin!

UMBULHARJO-Komis A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Satpol PP Kota Jogja menegur pengelola Hotel Grand Timoho untuk menghentikan sementara proyek pembangunan karena terbukti menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB).

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Proyek Hotel Grand Timoho itu memperoleh IMB hotel dengan satu lantai, namun faktanya proyek pembangunan hotel itu enam lantai (bukan delapan lantai seperti tertulis sebelumnya). Dinas Perizinan pun sudah mencabut IMB pada akhir Desember lalu. "Kalau IMB-nya sudah dicabut, [proses pembangunan] harus

Menurut Agus Nur, ketika IMB sudah dicabut, proses pembangunan menjadi tidak berizin.

Kepala Dinas Perizinan, Heri Karyawan membenarkan status proyek Hotel Grand Timoho di ruas Jalan Timoho, Umbulharjo menjadi tidak berizin setelah IMB dicabut.

Kepala Dinas Perizinan, Heri Karyawan membenarkan status proyek Hotel Grand Timoho di ruas Jalan Timoho, Umbulharjo menjadi tidak berizin setelah IMB dicabut.

Kepala Dinas Perizinan, Heri Karyawan membenarkan status proyek Hotel Grand Timoho di ruas Jalan Timoho, Umbulharjo menjadi tidak berizin setelah IMB dicabut. Ia mengatakan proses pencabutan IMB itu sudah melalui prosedur. Pengawas Dinas Perizinan menemukan konstruksi bangunan yang tidak sesuai dari yang seharusnya satu lantai menjadi enam lantai.

Pihaknya pun telah melayangkan surat teguran hingga tiga kali. "Status IMB-nya sekarang sudah dicabut," kata Heri. Dengan demikian, Heri menyarankan pengelola hotel harus memperbaiki IMB-nya. Namun, IMB yang diajukan belum bisa diproses saat ini karena masih dalam moratorium sampai 31 Desember 2017 nanti.

Adapun, Humas Hotel Grand Timoho, Adi R mengatakan proses pembangunan hotel terus berlanjut. Ia mengklaim pembangunan sudah sesuai prosedur. "Kami sudah mengantongi IMB," kata dia, saat ditemui di lokasi pembangunan hotel, kemarin.

di hentikan, tidak bisa tidak," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Agus Nur, Senin (9/1).

Menurut Agus Nur, ketika IMB sudah dicabut, proses pembangunan menjadi tidak berizin sehingga harus dihentikan sementara sampai mengurus kembali izinnya. Jika masih tetap dilanjutkan, Satpol PP-dulu Dinas Ketertiban-yang menjadi mitra komisinya harus menindak tegas.

Adi menyatakan pembangunan hotel berlanjut satu lantai sesuai izin yang dikehendaki. Pihaknya memang berencana mengembangkan hotel menjadi enam lantai. IMB pengembangan hotel pun akan diajukan kembali setelah lantai bangunan lantai satu selesai.

Ia menegaskan proses pembangunan hotel sudah sesuai prosedur. Bahkan sebelum mendapat IMB pihaknya sudah mendapat persetujuan warga yang tinggal di sekitar hotel di Kampung Tegai Mlati, Muja-Muja, Umbulharjo.

Adapun spanduk penolakan yang dipasang di depan hotel, kata Adi, yang memasang bukan warga. Ia menyadari ada seorang yang merasa tidak mendapatkan sosialisasi, yakni pemilik gedung di samping hotel. Padahal, Adi menyatakan sosialisasi sudah dilakukan, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Pihaknya sudah berupaya mendatangi pemilik gedung. Namun, hingga kemarin, belum ada titik temu. "Selama kompensasinya sesuai standar kami tidak masalah," katanya. Meski

Spanduk penolakan pembangunan hotel baru dipasang di Jalan Timoho, Senin (9/1).

tidak ada persetujuan dari seorang tersebut. "Kalau ada sembilan orang, satu orang tidak setuju kan tidak mungkin dibatalkan," tegas Adi.

Sementara pemilik gedung yang kini ditempati Jogja Film Academy, belum bisa dimintai konfirmasi terkait dengan penolakannya atas pembangunan Hotel Grand Timoho. Satpam setempat mengatakan, bosnya itu sedang tidak berada di kantor.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

.....
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005